**PELAKSANAAN OPER KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
PT BUANA FNANCE TBK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Oleh : Rio Julivan Sibarani

Pembimbing : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn.

Riska Fitriani, S.H.,M.H.

Alamat :Jl, Murni Nomor 5A Sigunggung Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan

Labuh Baru Barat, Pekanbaru

Email : julivanrio@gmail.com

Nomor HP :081277725594

ABSTRACT

The credit operation under the hands represents a transfer of liabilities from the old debtor to the new borrower to the fiduciary security object, the transfer of this credit without the consent of the creditor, the credit operation under this hand will cause further legal problems because of this without the consent of the creditor. The formulation of the problem is how the implementation of Law Number. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee of motor vehicle operations without known to the financing institution, how the legal efforts against credit operations without knowing by the financing institution. The results of this study that the credit operates have been frequent in all finance companies not only in PT. Buana Finance, Tbk the occurrence of this credit operations because the debtor is not able to continue installment payments, so that from the vehicle seized by the PT. Buana Finance Tbk, it is better to operate it to other party, but the problem of vehicle credit operation is done unnoticed by the company so that the debtor has violated Article 23 Paragraph (2) Fiduciary Law, which becomes the obstacle of this problem is the debtor Many do not know the legal consequences caused when doing credit operations unnoticed by the financing institutions in addition to lack of socialization of the company to the problem of credit oper, the vehicle in oper credit to others do not know its existence, and efforts made to overcome the existing obstacles , Where the debtor by giving an explanation to the debtor at the signing of the credit agreement, by explaining the credit operations, asks the old debtor to take responsibility for the transferred vehicle who does not know its existence by paying off the outstanding debt

Keyword: take over credit, Four-wheel vehicle, Fiduciary guarantee

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang eksistensinya di kukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹ Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.² Selain itu juga pada Pasal 36 juga menjelaskan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama (2) dua tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).³

Kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih merupakan suatu problem hukum yang harus diberikan kejelasannya. Pengertian kepemilikan benda dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda dan hak penguasaan atas benda. Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan

atas kepemilikan benda itu beralih kepada kreditur.⁴

Penelitian ini akan menggambarkan bahwa pihak debitur pertama mengalihkan hak atas barang bergerak kendaraan bermotor tersebut kepada debitur kedua (debitur baru) yang angsurannya masih sedang berjalan atau kredit belum lunas antara kreditur dengan debitur pertama yang lazim disebut pengalihan angsuran (*over credit*). Debitur pertama tidak memberitahukan kepada kreditur bahwa kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada debitur kedua. Pengalihan hak dari debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan masalah hukum karena debitur kedua menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak (*rechtstitel*) yang sah. Hal ini merupakan pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen (*debitur* pertama), selain itu kendaraan yang masa proses kredit tersebut telah didaftarkan jaminan fidusia dan memiliki sertifikat fidusia yang mana yang terdaftar tersebut adalah pihak pertama, bukan pihak kedua yang melanjutkan kredit tersebut, karena pihak kedua merupakan pihak yang melakukan *over credit* kendaraan yang terdaftar jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan.⁵

Begitu juga halnya yang terjadi pada PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru dimana banyak kendaraan yang masih proses kredit yang dialihkan kepada pihak lain tanpa diketahui pihak perusahaan, hal ini juga suatu yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: ***“Pelaksanaan oper kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan***

¹ Yoan Budiyanto, *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Lembaga Pembiayaan Selaku Kreditor Terhadap Musnah Atau Dialihkannya Objek Jaminan Fidusia*, Dalam Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 5

² Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³ Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴ Tan Kamello, *Op.cit.*, hlm. 190.

⁵ *Ibid*

pembiayaan konsumen PT. Buana Fnance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan oper kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Fnance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Apa yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan oper kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Fnance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Fnance Tbk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksar over kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Fnance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- b. Untuk mengetahui hambatan apa yang terjadi terhadap pelaksanaan pelaksanaan over kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan

konsumen PT. Buana Fnance Tbk.

- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Semoga hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum bisnis dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis sebagai wujud konkrit dari realisasi penerapan ilmu di bidang hukum yang penulis dapatkan selama ini.
- b. Sebagai bahan sumbangan penelitian yang berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam dunia akademik dan sekaligus dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan masalah ini.
- c. Sebagai sumbangan penulis dalam bentuk karya ilmiah terhadap Fakultas Hukum Universitas Riau guna menjadi bahan kolektif di perpustakaan dan juga bagi instansi terkait yakni Polsek Kampar.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III, tetapi Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan istilah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk. Keempat, intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan di pergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.⁷ Sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus di artikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

2. Teori tentang Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti kepercayaan.⁸ Bila seseorang atau badan usaha memperoleh fasilitas kredit dari bank/lembaga

keuangan lainnya, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak harus didasari akan adanya rasa saling percaya. Pemberi kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi kewajibannya, baik pembayaran hutang pokok, bunga, provisi dan lain-lain kewajiban yang menjadi kewajiban penerima kredit (debitur) sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Kredit dalam kegiatan perbankan atau lembaga keuangan lainnya merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena penghasilan terbesar dari suatu usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan dan lembaga keuangan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang cukup tinggi.

3. Teori Fidusia

Fidusia berasal dari kata “*Fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik atas barang yang di serahkan, setelah di lunasi utangnya. Sebaliknya kreditor percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang

⁷R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm. 49.

⁸ Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 217

Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh pemilik benda tersebut. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut. Debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 42 tahun 1999 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ke 3 (ketiga) apabila ada perjanjian yang dilakukan terlebih dahulu.⁹

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teor-teori di dalam masyarakat.¹⁰ dan penelitian ini yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Sehingga bisa mengungkapkan efektifitas dari suatu hukum dalam masyarakat.¹¹

⁹ Alfian Harris, *Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016

¹⁰ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.43.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.57

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

Data primer merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang sudah ditunjuk penulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, seperti Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku-buku literatur, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah, seminar, bagan, dll yang menyangkut pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat sosiologis maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian pengumpulan data dengan sebagai berikut ini:

a. Wawancara

Yaitu metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang hendak di sampaikan.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara megelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis tata, selanjutnya data yang bebentuk kalitatif disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian penulis melakukan interprestasi dan menghubungkan suatu data dengan data lainnya, kemudian penulis menghubungannya dengan teori-teori ahli dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan cara induktif, dokumen-dokumen dan data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

F. Pembahasan

A. Pelaksanaan Oper Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Buana Fnanse Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pengalihan kredit atau oper kredit kredit oleh debitur lama ke debitur baru yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak lembaga pembiayaan tidak selalu dilengkapi dengan akta otentik seperti perjanjian pengikatan perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan notaris dan juga tidak dilengkapi dengan surat kuasa mengambil dokumen jaminan di lembaga pembiayaan apabila kreditnya lunas. Namun debitur seringkali tidak memahami dan mengetahui bahwa setiap tindakan atas obyek jaminan yakni yang berupa kendaraan harus diberitahukan dan disetujui oleh lembaga pembiayaan apabila melakukan oper kredit kepada pihak lain, sehingga segala perjanjian antara debitur lama dengan debitur baru

dalam melakukan oper kredit secara di bawah tangan atau tanpa persetujuan dari pihak kreditur merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh lembaga pembiayaan, karena melanggar peraturan yang telah ada.¹² Hal ini dapat dilihat dari Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jamin kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia”

Menurut Andy Liue, mengatakan kebanyakan orang menganggap bahwa proses oper kredit cukup dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak debitur lama dan pihak debitur baru tanpa melibatkan pihak kreditur (lembaga pembiayaan/*leasing*) yang memberikan fasilitas pendanaan. Bentuk perjanjian seringkali dibuat di bawah tangan bahkan kadang-kadang hanya perjanjian lisan saja.¹³ Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. permasalahan yang sering terjadi adalah pihak penerima oper kredit tidak meneruskan angsuran dengan lancar sehingga timbul kredit bermasalah. Tentu saja pihak kreditur akan menagih kepada debitur lama karena perjanjian kredit masih atas nama debitur lama.¹⁴

Menurut Syaiful Adrianto Devisi Legal, bahwa oper kredit mobil di bawah tangan, tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk melunasi hutangnya kepada lembaga pembiayaan atau bank. Pasal 1365 BW menjelaskan, “tiap perbuatan

¹² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 4

¹³<http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/230378-oper-kredit-yang-aman.html>, diakses tanggal 1 Mei 2017

¹⁴ Wawancara dengan Andy Liue, Branch Manager PT. Buana Finance Tbk Cab. Pekanbaru, pada tanggal 20 Juni 2017, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/23/

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Walaupun mobil tersebut sudah berpindah tangan kepada pihak lain, debitur lama yang telah melakukan perjanjian kepada leasing (kreditur) tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena oper kredit tersebut dilakukan di bawah tangan atau tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan. Berbeda halnya apabila oper kredit tersebut dilakukan secara sah, atau dengan melakukan pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.¹⁵

Ada akibat lain jika membeli kendaraan secara oper kredit tanpa diketahui oleh lembaga pembiayaan yang dalam hal ini adalah kreditur, yakni :¹⁶

1. Kendaraan akan sulit diperjualbelikan kembali sebelum terjadi pelunasan.
2. Dokumen kurang memiliki kekuatan hukum apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

Akan sulit mengambil jaminan atau BPKB jika kredit telah berakhir. Pembeli harus meminta penjual untuk mengambilnya, dan melakukan balik nama. Tentunya ini bukan persoalan yang mudah, lebih-lebih jika penjual tidak diketahui keberadaannya.

Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan

benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan melanggar undang-undang jaminan fidusia serta dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia "Pemberi fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)".¹⁷

Perbuatan mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh utang debitur kepada kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur. Tindakan debitur tersebut dapat dikatakan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".¹⁸

2. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Oper Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Tanpa Diketahui Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Buana Finance Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁵Wawancara dengan Syaiful Aldiandri, Devisi Legal P. Buana Finance Tbk Cab. Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2017, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Yurizal, *Aspek Pidana dalam....Op.Cit.* hlm 88

¹⁸ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid)

Menurut devisa legal bahwa hambatan yang terjadi terhadap oper kredit tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan yang selama ini terjadi di PT. Buana Finance. Tbk adalah dimana debitur yang ingin melakukan oper kredit banyak tidak tahu akan proses dan pelaksanaan proses oper kredit yang resmi bahkan tidak ingin tahu dan sehingga debitur melakukan oper kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan, dan tujuan dari debitur lama melakukan oper kredit kendaraan kepada pihak lain atau debitur baru adalah supaya kendaraan yang menjadi objek kredit tersebut tidak ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan dan tidak mengalami kerugian yang besar.¹⁹

Menurut debitur yang menjadi hambatan terhadap oper kredit yang tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan adalah dimana tidak adanya sosialisasi yang dilakukan dari pihak lembaga pembiayaan kepada debitur tentang akibat hukum, boleh atau tidaknya dilakukan oper kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan, karena pada saat debitur membeli mobil melalui showroom rekanan dari lembaga pembiayaan yakni PT. Buana Finance Tbk, pihak marketing datang ke rumah debitur melakukan kunjungan atau *survey* dan meminta data debitur untuk diproses kredit setelah itu apabila disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara debitur dengan pihak lembaga pembiayaan, pada saat penandatanganan perjanjian kredit lembaga pembiayaan tidak pernah memberikan penjelasan terhadap proses oper kredit apabila debitur

tidak sanggup melanjutkan angsuran pembayarannya.²⁰

Terhadap oper kredit yang terjadi tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan yang terjadi selama ini, menurut Andy Liue bahwa hambatan yang terjadi selama ini debitur melakukan peralihan kredit kepada pihak lain tidak melakukan konsultasi atau menanyakan kepada pihak lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit, dan banyaknya kredit macet atau kredit yang bermasalah yang sering dijumpai adalah debitur-debitur yang melakukan oper kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan dan ketika pihak kreditur atau lembaga pembiayaan melakukan kunjungan kepada rumah debitur yang kreditnya menunggak dimana kendaraan sudah dialihkan kepada pihak lain, kreditur meminta bantuan kepada debitur lama untuk mencari debitur baru tersebut kadang kalah debitur baru yang menerima pengalihan kredit tersebut tidak diketahui keberadaannya.²¹

Menurut debitur baru yang meneruskan kredit dimana kredit yang diteruskan dari debitur lama atau yang menerima oper kredit yang tanpa diketahui dari pihak lembaga pembiayaan, dimana kredit yang diteruskan lancar sampai lunas, namun ada hambatan dalam proses pengambilan jaminan yakni Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB pada lembaga pembiayaan, dimana pihak lembaga pembiayaan tidak mau menyerahkan BPKB karena oper kredit dilakukan tanpa persetujuan dari pihak kreditur selaku pemberi kredit, dan sesuai penjelasan dari pihak kreditur nama di sistem PT. Buana Finance Tbk masih atas nama debitur

¹⁹ Wawancara dengan Syaiful Aldiandri, Devisa Legal P. Buana Finance Tbk Cab. Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2017, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3

²⁰ Wawancara dengan Bapak Zulfan, Debitur PT. Buana Finance Tbk, pada tanggal 4 Juni 2017, di tanjung datuk No. 16 Pekanbaru

²¹ Wawancara dengan Andy Liue, Branch Manager PT. Buana Finance Tbk Cab. Pekanbaru, pada tanggal 20 Juni 2017, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/23

lama, sehingga pihak lembaga pembiayaan belum bisa menyerahkan BPKB tersebut.²²

Selain itu juga menurut devisa legal PT. Buana Finance Tbk, bahwa hambatan yang terjadi dilapangan terhadap oper kredit kendaraan bermotor roda empat yang tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan debitur yang ingin meneruskan kredit tersebut banyak keberatan dengan syarat yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan, karena setiap yang melakukan oper kredit jika melalui pihak lembaga pembiayaan maka harus dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 1.500.000 yang dibebankan kepada debitur baru, sehingga dengan ada biaya tersebut banyak debitur yang melakukan oper kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan, kadang kalah diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan bahwa kendaraan tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain setelah terjadinya kredit macet atau debitur tidak melakukan pembayaran angsuran, tapi sebenarnya pihak lembaga pembiayaan telah memberikan perjanjian kredit kepada debitur yang mana dalam perjanjian tersebut debitur tidak boleh melakukan pengalihan kredit atau melakukan oper kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan, jika ingin melakukan oper kredit maka debitur lama dan debitur baru harus datang bersama-sama ke kantor untuk membicarakan terhadap proses alih debitur tersebut, tidak melakukan oper kredit atau peralihan kredit tanpa diketahui oleh lembaga pembiayaan, karena kedepannya nanti apabila debitur baru tidak melakukan pembayaran kredit maka debitur lama harus bertanggungjawab atas segala utangnya, jika tidak mampu melunasi utangnya maka kendaraan yang menjadi jaminan

²² Wawancara dengan Bapak Sumardi, Debitur Baru, pada tanggal 4 Juni 2017, di tanjung datuk No. 16 Pekanbaru

tersebut harus diserahkan ke pihak lembaga pembiayaan.²³

3. Upaya mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan oper kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Finance Tbk

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga terhadap hambatan terjadi dalam proses oper kredit yang tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan, dimana terhadap banyak debitur yang tidak tahu atau paham terhadap akibat hukum oper kredit yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak PT. Buana Finance. Tbk, dimana marketing pada saat akan melakukan panandatangan perjanjian kredit, memberikan penjelasan seputar oper kredit apabila debitur tidak sanggup lagi melanjutkan angsurannya, dan melarang debitur melakukan oper kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan, selain itu juga upaya yang dilakukan terhadap oper kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan, dimana apabila kendaraan sudah dipindahtangkan kepada pihak lain dan menjadi kredit macet maka pihak lembaga pembiayaan meminta debitur lama untuk bertanggungjawab atas segala sisa utang debitur untuk segera melunasinya, jika tidak bisa maka debitur harus mencari pihak yang menerima oper kredit tersebut untuk segera menyerahkan kendaraannya kepada lembaga pembiayaan.²⁴

Selain itu juga langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh pihak lembaga pembiayaan dalam hal untuk

²³ Wawancara dengan Swandy, Devisa Legal P. Buana Finance Tbk Cab. Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2017, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3

²⁴ Wawancara dengan Andy Liue, Branch Manager PT. Buana Finance Tbk Cab. Pekanbaru, pada tanggal 20 Juni 2017, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/23

menyelamatkan kredit apabila mengetahui telah terjadi peralihan kreditur atau oper kredit yang tanpa diketahui oleh lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut :²⁵

1. Lembaga pembiayaan dapat memperingatkan kepada debitur segera melunasi seluruh sisa hutang sebab meskipun kendaraan telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain, dan secara hukum tidak menghilangkan kewajiban debitur, dengan kata lain debitur tetap bertanggung jawab untuk melunasi utangnya.
2. Tindakan atau perbuatan debitur dengan menjual kendaraan seperti mobil tanpa persetujuan dari pihak lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan sebagai pemegang dokumen jaminan kendaraan dapat membatalkan penjualan kendaraan tersebut.

Menurut devisi legal mengatakan bahwa debitur baru yang menerima oper kredit kendaraan bermotor yang tanpa diketahui lembaga pembiayaan, dimana angsuran dibayar sampai lunas, dan kendalanya tidak bisa mengambil jaminan, maka pihak lembaga pembiayaan memberikan upaya dengan cara meminta, semua bukti pembayaran selama proses peralihan kredit, selain itu juga meminta penjaminan pribadi dengan menandatangani surat pernyataan penjamin apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain dimana pihak perusahaan tidak dapat dituntu secara hukum baik perdata ataupun pidana, selain itu juga pihak lembaga pembiayaan selama satu bulan mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitur lama dan juga melakukan konfirmasi via telpon

²⁵ Wawancara dengan Barita Marpaung, Spv Colection PT. Buana Finance Tbk. Cab. Pekanbaru, pada tanggal 19 Juni 2017, Bertempat Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3

kepada debitur terkait oper kredit tersebut, jika semua proses tersebut sudah dilakukan barulah pihak lembaga pembiayaan menyerahkan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB kepada debitur baru tersebut.²⁶

Bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh debitur baru selaku pembeli mobil yang menerima pengalihan kredit atau oper kredit secara di bawah tangan atau tanpa diketahui oleh pihak lembaga pembiayaan, guna menjamin pembelian objeknya tersebut agar dapat menjadi haknya secara formal, antara lain sebagai berikut:²⁷

1. Pembeli (debitur baru) sebaiknya melakukan balik nama kendaraan bermotor melalui proses alih debitur secara resmi. Alih debitur tersebut dapat dilakukan dengan membuktikan terlebih dahulu keabsahan perjanjian tersebut dan apabila perjanjian tersebut dapat terbukti, maka proses alih debitur dapat dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang.
2. Memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai segala risiko yang dapat merugikan pembeli (debitur baru). Risiko tersebut dapat berupa proses panjang yang harus dipenuhi dalam melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Apabila pembeli (debitur baru) telah melunasi seluruh kewajiban hutang atas nama debitur pertama dan telah menerima pernyataan lunas dari lembaga pembiayaan, maka debitur baru pada waktu akan mengambil dokumen-

²⁶ Wawancara dengan Syaiful Aldiandri, Devisi Legal P. Buana Finance Tbk Cab. Pekanbaru, pada tanggal 21 Juni 2017, bertempat di Jln. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Blok A2/A3

²⁷ *Ibid*

dokumen seperti BPKB harus dapat menunjukkan bukti-bukti peralihan kredit tersebut.

Dalam kasus telah terjadi alih debitur yang dilakukan di bawah tangan dan debitur lama kemudian tidak diketahui lagi domisilinya, maka menurut penulis langkah penyelesaiannya secara hukum adalah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri setempat. Karena Pengadilan yang dapat memutuskan dengan pertimbangannya sendiri bahwa oper kredit yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak lembaga pembiayaan atau sering disebut dimasyarakat oper kredit di bawah tangan dapat disahkan atau tidak. Sepanjang pihak lembaga pembiayaan tidak mempersoalkan atau membatalkan jual beli tersebut maka ada beberapa yang dapat ditempuh oleh pihak lembaga pembiayaan dan pihak pembeli untuk mengatasi kebuntuan hukum dari permasalahan tersebut, dan oleh karena itu umumnya masyarakat yang menjadi debitur harus lebih kritis dan memahami akibat hukum yang timbul apabila melakukan take oper atau oper kredit dibawah tangan, karena kebanyakan masyarakat mengabaikan bahkan tidak tahu akibat yang timbul apabila melakukan oper kredit tanpa persetujuan dari pemberi kredit yakni lembaga pembiayaan.

G. Penutup.

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan oper kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Finance Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, merupakan sering terjadi di semua lembaga pembiayaan bukan hanya di perusahaan PT. Buana Finance Tbk

namun tindakan oper kredit tanpa diketahui oleh pihak perusahaan merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yakni tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang jaminan fidusia dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum serta Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, terjadi oper kreditnya ini umumnya terjadi pada debitur yang mengalami kredit macet dan tidak mau kendaraan di sita oleh pihak lembaga pembiayaan karena takut mengalami kerugian yang besar, sehingga kendaraan tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk diteruskan pembayaran.

- b. Hambatan terhadap pelaksanaan oper kredit kendaraan bermotor roda empat tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan konsumen PT. Buana Finance Tbk berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dimana banyak debitur yang tidak tahu tentang proses dan tata cara oper kredit yang resmi, sehingga dilakukan oper kredit dengan tidak melibatkan pihak lembaga pembiayaan, selain itu juga debitur tidak tahu akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan oper kredit tanpa diketahui pihak perusahaan, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada debitur pada saat melakukan penandatanganan perjanjian kredit, dan tidak menjelaskan perihal tentang oper kredit, baik yang resmi maupun tanpa diketahui oleh pihak perusahaan, dan kredit yang diteruskan dengan melalui oper

kredit yang tidak diketahui perusahaan, hambatan yang ada apabila kredit lancar dan lunas, dimana debitur tidak bisa mengambil jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB

- c. Upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada, dimana pihak perusahaan melakukan dimana melalui marketing pada saat penandatanganan kredit, memberikan penjelasan kepada debitur perihal oper kredit, dalam hal oper kredit yang telah dilakukan dan berjalan lunas, untuk pengambila dokumen jaminan yakni berupa BPKB, pihak lembaga pembiayaan akan menyerahkan apabila telah menerima bukti pembayaran selama dari awal proses kredit sampai dengan lunas, meminta debitur untuk menanda tangani surat penjamin dan juga melakukan konfirmasi via telpon kepada debitur perihal jaminan BPKB yang mau diambil oleh pihak yang menerima oper kredit tersebut, selain itu juga upaya lain yang dilakukan terhadap oper kredit yang diteruskan oleh pihak lain menjadi kredit macet dimana pihak lembaga pembiayaan meminta debitur lama untuk melunasi utang dan jika tidak bisa debitur lama harus menyerahkan kendaraan kepada pihak lembaga pembiayaan dengan mencari debitur baru tersebut

2. Saran

- a. Terhadap pelaksanaan oper kredit kendaraan bermotor yang sering terjadi dilakukan di bawah tangan hendaknya lembaga pembiayaan melakukan upaya hukum preventif dengan melakukan sosialisasi atas larangan kepada debitur terhadap melakukan oper kredit di bawah

tangan tanpa persetujuan kreditur, dan menjelaskan kepada debitur bahwa akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, hal ini banyak yang tidak mengetahui akibat hukum yang akan terjadi terhadap oper kredit tanpa diketahui pihak lembaga pembiayaan

- b. Hendaknya kepada debitur baru maupun debitur lama jika akan melakukan peralihan kredit atau oper kredit sebaiknya memberikan informasi kepada pihak kreditur dan dilakukan secara resmi, karena dengan secara resmi ini, apabila kredit tersebut menjadi kredit bermasalah, maka debitur lama sudah lepas tanggungjawabnya.
- c. Diharapkan agar kekuatan hukum pembuktian bagi perjanjian di bawah tangan dilakukan legalisasi di notaris sehingga dapat menghindari penipuan dibelakang hari.

H. Daftar Pustaka

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. 1980, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasanuddin, Rahman, 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamello, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *hukum Acara Perdata Indonesian*, Liberty, Yogyakarta.
- Projodikoro R. Wiryono, 2003, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Prajitno, Andreas, Albertus Andi, 2010, *Hukum Fidusia*, PT. Intermesa, Malang.
- Purwahid, Patrik dan Kashadi, 2007, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum; Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*, Alfabeta, Bandung.
- Rahardjo, Handri, 2003, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2004, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1977, *Hukum jaminan di Indonesia. Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Simorangkir, O. P, 1989, *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty, Yogyakarta.
- Satrio. J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus / Jurnal

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Alfian Harris, *Akibat Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tuah Negeri Mandiri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016
- Sri Ahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, ISSN : 2338-7777- 2014, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Vol 2 No 2 Desember 2015 ISSN : 2303-0119, Jurnal Ilmu Hukum, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Undang Undang No. 42
Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 168

Keputusan Menteri Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor
1251/KMK.03/1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
Keppres No. 61 Tahun 1988 1 angka
(2) Keppres No. 61 Tahun 1988 Jo.
Pasal 1 huruf (b) SK.Menkeu No,
251/KMK.013/1988.

D. Website.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1711/1353>, diakses 12 November 2017, pada pukul 15:00 Wib.